



KYMM FP-UI



Piagam Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat

Rembuk Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat



**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)
Sumatera Barat
2024**

SERUAN ORANG MUDA UNTUK SUMATERA BARAT PULIH

Tepat saat demokrasi genting, ketika rezim berkonspirasi melakukan upaya pembangkangan konstitusi, mengakali regulasi pemilihan kepala daerah untuk pelanggaran dinasti oligarki, kami dari berbagai organisasi telah melakukan Rembuk Orang Muda untuk Sumatera Barat dan Indonesia PULIH!!!

Kami sebagai intelektual muda, dengan kesadaran penuh memahami : wibawa, harkat dan martabat bangsa sedang direndahkan oleh kepentingan segelentir elit, kami menyebutnya dinasti oligarki. Mereka bicara demokrasi tetapi bukan untuk kedaulatan rakyat!!!

Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat telah mengikuti proses demokrasi pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, kini akan dihadapkan pada pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tetapi, kekuasaan terpilih (dan akan terpilih) dari hasil demokrasi, hampir bisa disimpulkan mengarah pada kata GAGAL mewujudkan dan menjaga kedaulatan rakyat!!! Krisis politik, melahirkan krisis sosial-ekologis. Kami akan pertahankan tanah - air dan ikut memastikan tumbuhnya demokrasi sesuai kehendak konstitusi!!!

Untuk itu, kami Orang muda Sumatera Barat, akan memainkan politik ekologis yang akan memilah pilihan untuk Sumatera Barat Pulih. Bagi kami, Sumatera Barat bukan sekedar nama yang merujuk pada geografis provinsi yang menghadap ke samudera yang maha luas. Sumatera Barat bagi kami inklusifitas dan kolaborasi berbagai lapisan dan elemen penyusun defenisi masyarakat. Lebih dari itu, Sumatera Barat bagi kami adalah tilas masa lalu yang menyejarah, hari ini yang belum usai, hari depan yang mesti digapai. Sumatera Barat bagi kami adalah satu kesatuan yang menubuh!!!

Untuk itu, bermula rembuk di hari kamis 22 Agustus 2024 dan pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, Kami bertekad akan melipatgandakan kekuatan untuk demokrasi yang berakar pada kedaulatan rakyat dan berorientasi pada keadilan antar generasi.

Dengan ini kami mendeklarasikan sikap politik kami :

1. **Kami Intelektual Muda Sumatera Barat** adalah generasi yang mengoreksi para penguasa. Kekuasaan itu, harus kembali kepada pemiliknya, RAKYAT!!!
2. **Kami Intelektual Muda Sumatera Barat** mengingatkan dan akan terus mendesak KPU Provinsi Sumatera Barat – KPU Kabupaten – Kota Se Sumatera Barat dan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat – BAWASLU Kabupaten – Kota Se Sumatera Barat untuk :
 - a. Menghormati dan menjalankan konstitusi secara sungguh-sungguh, tidak terjebak pada kepentingan elit dinasti oligarki;
 - b. Memastikan seluruh proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan secara Ramah Lingkungan, dengan cara namun tidak terbatas pada:
 - 1) Menetapkan keputusan dan/atau kebijakan yang berlaku bagi internal penyelenggara PILKADA dan Peserta PILKADA (Pasangan Calon, Partai Pengusung dan Tim Pemenangan) berupa PEMBATASAN dan PENGURANGAN Sampah Plastik, diantaranya dengan cara TIDAK menggunakan kemasan, kantong,



- botol, sedotan, piring, gelas dari plastik sekali pakai pada semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- 2) Memastikan alat peraga – bahan kampanye peserta PILKADA tidak merusak dan mencemari lingkungan serta dengan cara namun tidak terbatas pada tidak memaku dan memasang alat peraga – bahan kampanye pada pohon, taman, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan pada lokasi-lokasi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat;
 - 3) Memastikan sumber dana kampanye peserta PILKADA tidak berasal dari usaha-bisnis illegal, merusak lingkungan dan merampas ruang dan sumber - sumber penghidupan rakyat;
 - 4) Memastikan peserta PILKADA tidak memproduksi informasi hoaks dan materi kampanye yang berpotensi memecah belah persatuan-kesatuan dan menggerus nilai-nilai adat – kebudayaan dan kearifan lokal di Sumatera Barat;
3. **Kami Intelektual Muda Sumatera Barat** akan mengingatkan dan terus mendesak para peserta PILKADA serentak tahun 2024, baik pasangan calon, partai pengusung dan tim pemenang untuk :
- a. Menghormati dan menjalankan konstitusi secara sungguh-sungguh, tunduk dan patuh pada kehendak rakyat dan berani menolak kepentingan elit dinasti oligarki;
 - b. Memastikan seluruh proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan secara Ramah Lingkungan, dengan cara namun tidak terbatas pada:
 - 1) Menetapkan keputusan dan/atau kebijakan yang berlaku bagi seluruh tim Peserta PILKADA berupa PEMBATASAN dan PENGURANGAN Sampah Plastik, diantaranya dengan cara TIDAK menggunakan kemasan, kantong, botol, sedotan, piring, gelas dari plastik sekali pakai pada semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 2) Memastikan alat peraga – bahan kampanye sebagai peserta PILKADA tidak merusak dan mencemari lingkungan serta dengan cara namun tidak terbatas pada tidak memaku dan memasang alat peraga – bahan kampanye pada pohon, taman, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan pada lokasi-lokasi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat;
 - 3) Memastikan sumber dana kampanye sebagai peserta PILKADA tidak berasal dari usaha-bisnis illegal, merusak lingkungan dan merampas ruang dan sumber - sumber penghidupan rakyat;
 - 4) Memastikan diri sebagai sebagai peserta PILKADA, tidak memproduksi informasi hoaks dan materi kampanye yang berpotensi memecah belah persatuan-kesatuan dan menggerus nilai-nilai adat – kebudayaan dan kearifan lokal di Sumatera Barat;
4. **Kami Intelektual Muda Sumatera Barat** menyerukan dan akan mengawal Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih pada PEMILU 2024, serta para peserta PILKADA serentak tahun 2024, baik pasangan calon, partai pengusung dan tim pemenang, untuk menaruh perhatian serius pada agenda pemulihan persoalan utama Sumatera Barat sebagai berikut ini :
- a. Krisis lingkungan dan Perampasan Sumber Daya Alam;



- b. Krisis Ekonomi khususnya masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan – sumber ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat;
- c. Pendidikan yang tidak merata, berbiaya mahal dan mengarah pada kapitalisasi pendidikan;
- d. Tergerusnya nilai-nilai sosial - adat – kebudayaan yang dipicu diantaranya oleh distraksi teknologi dan/atau fenomena “fear of missing out”, judi online, kesehatan mental, serta kebijakan investasi yang secara sistemik menyebabkan terhapusnya identitas adat-kebudayaan (Etnosida);
- e. Rendahnya kualitas layanan kesehatan dan memburuknya kesehatan masyarakat akibat rusak dan tercemarnya lingkungan;
- f. Pengaturan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan keadilan antar generasi dan keadilan ekologis, sehingga berdampak pada penyingkiran dan pemiskinan masyarakat adat dan komunitas- komunitas rakyat;
- g. Belum adanya road-map kebijakan daerah untuk pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat, terutama tanah ulayat (termasuk hutan adat);
- h. Tingginya angka bencana ekologis yang dipicu oleh investasi rakus ruang dan illegal dan kebijakan pembangunan - investasi yang tidak berbasis pada kajian risiko bencana;
- i. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama pada layanan sosial dan kesehatan, serta belum terbangunnya mekanisme komplain yang transparan dan akuntabilitas;
- j. Meningkatnya potensi penyebaran informasi hoaks dan lemahnya literasi digital;
- k. Hilangnya hak atas rasa aman warga negara, seperti masih banyak laporan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum dan munculnya beragam kasus kriminalitas;
- l. Isu kesenian dan kebudayaan belum menjadi isu utama dalam kebijakan daerah;
- m. Masih lemahnya dukungan kebijakan dan anggaran untuk perlindungan hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- n. Masih rendahnya moderasi beragama di Sumatera Barat;
- o. Belum adanya road-map konsep pertanian berkelanjutan dan berketahanan iklim;
- p. Masih lemahnya perlindungan hukum atas kebebasan pers dan berpendapat, Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan;

Terhadap persoalan utama diatas, kami telah mendiagnosa akar masalahnya, menyusun visi dan resolusi untuk segera PULIH!!! Gagasan itu kami tuangkan dalam Piagam Rembuk Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat. Kami akan serahkan untuk dijadikan pedoman, pertimbangan dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan daerah dimasa depan, agar dijadikan rujukan dalam mencapai visi Sumatera Barat dan Indonesia PULIH 2045!!!

5. **Kami Intelektual Muda Sumatera Barat** akan terus menyuarakan dan memastikan seluruh orang muda dan masyarakat yang akan menggunakan hak pilih pada PILKADA serentak tahun 2024 untuk :
 - a. Memiliki kesadaran penuh bahwa rakyat sebagai pemilih adalah pemegang kedaulatan, PILKADA adalah salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan itu;
 - b. Terus mengorganisir gerakan pemilih untuk PILAH seluruh pasangan calon kepala daerah, partai pengusung dan tim pemenangannya!!! Kita pelajari sikap, perilaku dan jejak rekamnya;
 - c. Kita pastikan!!! Siapa saja pasangan calon, partai pengusung dan tim pemenangan yang memiliki rekam jejak melanggar hak asasi manusia – pengkhianat konstitusi, perusak



lingkungan, perampas sumber daya alam, perampas tanah – air sumber penghidupan masyarakat, pendukung dan/atau terlibat pada kasus-kasus tambang illegal, penebangan pohon illegal, penggusuran rakyat atas nama investasi, menciderai dan merampas hak-hak masyarakat adat, siapa saja mereka, **MEREKA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN SUMATERA BARAT;**

- d. Kita memilah, sebelum memilih, untuk Sumatera Barat dan Indonesia PULIH!!!!

Padang, 25 Agustus 2024



PIAGAM ORANG MUDA PULIHKAN SUMATERA BARAT

Kami adalah generasi yang harus mengoreksi para penguasa dan kekuasaan itu akan kami kembalikan kepada rakyat. Masa depan bagi kami adalah hubungan saling mengisi dan saling memahami antara rakyat dan entitas kekuasaan yang kepadanya kami percayakan jalannya pemerintahan.

Kami, perwakilan orang muda Sumatera Barat dari 7 kota dan 12 kabupaten telah berkumpul dalam Rembuk Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat (ROMPI SUMBAR) pada tanggal 22 Agustus 2024 di Padang. Rembuk ini merupakan wujud kesadaran kami terhadap peran vital pemuda dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup dan perbaikan tatanan sosial masyarakat di Sumatera Barat. Berangkat dari ketersadaran itu, kami menyadari pentingnya suara orang muda untuk memperbaiki keadaan Sumatera Barat yang kini mengalami berbagai persoalan multidimensi yang sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Keadaan wilayah kabupaten dan kota yang menyusun Provinsi Sumatera Barat selama beberapa waktu terakhir berada di titik nadir dan kian kritis. Berbagai persoalan yang menjadi sebabnya mencakup krisis lingkungan hidup yang menyebabkan berbagai bencana ekologis hingga krisis sosial yang kian mendekati nuansa eksklusifitas suatu lapisan masyarakat dan supremasi mayoritas melalui intoleransi atas keberagaman.

Di atas fenomena disruptif tersebut, negara beserta pamong pemerintahannya secara sembrono menyematkan optimisme semu bertajuk "Indonesia Emas 2045" yang dibebankan kepada generasi muda. Hal sama juga diidap oleh penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan negara. Akan tetapi, para pemimpin di Sumatera Barat secara sistematis justru memosisikan orang muda di atas bom waktu katastrofe yang multidimensional. Jebakan itu kontan berujung pada pembebanan atas dosa-dosa ekologis dan dosa-dosa sosial-budaya para pemimpin Sumatera Barat, dan orang muda adalah pihak yang mesti menanggung seluruh dosa itu.

Sekilas, para pamong pemerintahan daerah di Sumatera Barat mencuci tangan melalui dalih pelibatan orang muda dalam pengambilan kebijakannya. Namun, definisi orang muda dalam kaca mata para politisi dan birokrat tersebut diukur dari kesepakatan politik dan penyamaan kepentingan. Pola pemerintahan daerah yang menciptakan oligarki lokal ini, tanpa mereka sadari, justru mengakibatkan kemunduran bagi Sumatera Barat.

Efek disruptif itulah yang menghasilkan berbagai bencana ekologis yang menerjang berbagai daerah di Sumatera Barat beberapa waktu terakhir, di mana bencana ekologis itu berpotensi terus menghasilkan bencana alam lainnya secara sistemik dan kian membesar. Bahkan efek disruptif pengambilan kebijakan yang sembrono juga menghasilkan pola perilaku sosial masyarakat yang kian hari terjebak pada supremasi kesukuan dan supremasi agama mayoritas, serta berimbas pada pola marjinalisasi lapisan masyarakat tertentu yang kian terpinggirkan.

Kami adalah saksi hancurnya perkampungan di pedalaman Sumatera Barat karena bencana alam yang diakibatkan oleh penebangan pohon secara serampangan di kawasan terlarang, tumbuhnya bangunan liar di bantaran aliran batang air. Kami adalah saksi dari menyempitnya fasilitas umum yang menopang fungsi sosial, penyempitan katup-katup demokrasi atas penolakan kebijakan pemerintah daerah yang dicapai melalui kalkulasi politik untung-rugi. Kami



menyaksikan hilangnya daya saing angkatan kerja di usia produktif, anak-anak usia sekolah yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan terjebak dalam tindakan kriminal. Kami menyaksikan pengusiran masyarakat hukum adat dari tanah yang mereka huni jauh sebelum Indonesia berdiri, kami menyaksikan syahwat proyek strategis nasional yang menguntungkan segelintir orang. Kami bersaksi bahwa ketidakadilan telah menjadi sel kanker yang menggerogoti Sumatera Barat, bahwa kami menyaksikan generasi kami tengah diseret ke atas altar untuk dijadikan tumbal bagi proyek-proyek materialistis para oligarkis.

Pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 merupakan momentum penentuan. Generasi kami mengalami pertambahan sejumlah 78.126 orang dibanding kontestasi politik kotor dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Februari lalu. Pertambahan itu kian melambungkan persentase pemilih dari generasi muda hingga mencapai 59,47% dari Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Sumatera Barat. Kami adalah suara mayoritas dalam kontestasi politik lokal yang tidak akan kami biarkan dimanfaatkan sebagai alat pelanggengan politik dinasti yang diatur sedemikian rupa oleh oligarki.

Sebagai generasi yang akan mewarisi Sumatera Barat, kami mesti melakukan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan yang semborono. Sumatera Barat bagi kami tidak sekadar nama yang merujuk pada geografis provinsi yang menghadap ke Samudera Indonesia yang Mahaluas. Sumatera Barat bagi kami adalah hidup, denyut jantung dan vitalitas tak berujung. Sumatera Barat bagi kami adalah inklusifitas dan kolaborasi antara berbagai lapisan serta elemen penyusun definisi masyarakat. Lebih dari itu, Sumatera Barat bagi kami adalah tilas masa lalu yang menyejarah, hari ini yang belum selesai, dan hari depan yang mesti kami gapai. Sumatera Barat dan kami adalah satu kesatuan yang menubuh.

Kami adalah generasi yang tengah mengoreksi para penguasa, dan kekuasaan itu kami kembalikan ke tangan pemiliknya; rakyat.



Lingkungan, Perampasan Sumber Daya Alam dan Bencana Ekologis di Sumatera Barat

Sumatera Barat, sebuah provinsi yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini berada di persimpangan jalan yang kritis. Hutan-hutannya yang lebat, pantai-pantainya yang indah, dan sumber daya alam yang melimpah tidak hanya merupakan aset ekonomi, tetapi juga penopang kehidupan bagi jutaan penduduknya. Namun, tekanan dari perkembangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, dan kebijakan lingkungan yang lemah telah mengakibatkan kerusakan yang luas. Fenomena seperti deforestasi, pencemaran air, dan alih fungsi lahan telah menjadi masalah nyata yang mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

Permasalahan

Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Barat telah mengalami berbagai peristiwa kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang memperlihatkan betapa seriusnya krisis yang sedang dihadapi:

- **Deforestasi di Pegunungan dan Kepulauan Mentawai:** Hutan di Sumatera Barat, termasuk di kawasan Pegunungan Bukit Barisan dan Kepulauan Mentawai, mengalami penebangan liar dan perambahan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit dan pertambangan. Di Mentawai, eksploitasi oleh perusahaan kayu telah mengurangi tutupan hutan, menyebabkan erosi tanah, penurunan kualitas air, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hutan adat yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat setempat terus tergerus, memicu konflik lahan antara perusahaan dan komunitas lokal.
- **Pencemaran dan Overkapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA):** Kota Padang, ibu kota provinsi, menghadapi masalah pengelolaan sampah yang kritis. TPA Air Dingin, salah satu TPA utama, telah mengalami overkapasitas, menyebabkan tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini tidak hanya menimbulkan bau tak sedap dan pemandangan yang merusak, tetapi juga mencemari tanah dan air. Di sepanjang pantai, limbah plastik dan sampah lainnya mencemari laut, merusak habitat laut, dan mengancam pariwisata lokal.
- **Alih Fungsi Lahan dan Bencana Ekologis:** Di Kabupaten Agam, alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan perumahan dan komersial telah memicu masalah serius. Pada tahun 2022, banjir bandang melanda daerah tersebut, menewaskan beberapa orang dan merusak ratusan rumah. Alih fungsi lahan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan memperburuk risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Tanah yang kehilangan vegetasi alami tidak lagi mampu menyerap air hujan secara optimal, sehingga memicu banjir bandang yang menghanyutkan.
- **Pencemaran Sungai dan Kerusakan Ekosistem:** Sungai Batang Arau di Kota Padang, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi ribuan penduduk, kini dipenuhi limbah domestik dan industri. Limbah dari pabrik tekstil dan rumah tangga mengalir bebas tanpa



pengolahan yang memadai, mencemari air sungai dan mengancam kesehatan masyarakat. Keanekaragaman hayati sungai semakin berkurang, dengan ikan-ikan dan biota sungai lainnya yang mati atau menghilang.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam ROMPI, menyerukan tindakan nyata dan segera dari pihak pemerintah. Desakan ini meliputi:

- **Penegakan Hukum Lingkungan yang Tegas:** Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Penebangan liar, perambahan hutan, dan pencemaran air harus ditindak dengan sanksi yang tegas. Ketiadaan penegakan hukum yang efektif hanya akan mendorong pelaku pelanggaran untuk terus melakukan perusakan lingkungan.
- **Transparansi dalam Proses Pemberian Izin Lingkungan:** Pemerintah harus memastikan bahwa setiap izin lingkungan dan izin usaha yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Proses AMDAL harus menjadi instrumen yang ketat dan independen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
- **Penguatan Skema Perhutanan Sosial dan Perlindungan Hutan Adat:** Mengembangkan dan memperluas skema perhutanan sosial untuk memberikan hak kepada masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Perlindungan hutan adat harus menjadi prioritas, mengingat hutan-hutan ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat adat.
- **Pengelolaan Sampah yang Efektif:** Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dengan membangun fasilitas TPA yang modern dan sistem daur ulang yang efektif. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai harus digalakkan.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Generasi muda Sumatera Barat memiliki visi untuk masa depan yang berkelanjutan dan adil, di mana sumber daya alam dikelola secara bijak untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat:

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Mengembangkan model ekonomi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, di mana hutan, sungai, dan laut diperlakukan sebagai aset yang harus dilindungi. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Pemberdayaan Komunitas Lokal dan Pemuda:** Melibatkan masyarakat lokal, terutama pemuda, dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ini termasuk pelatihan dan pendidikan tentang konservasi, pertanian

berkelanjutan, dan pengelolaan sampah. Masyarakat lokal harus menjadi garda depan dalam upaya pelestarian lingkungan.

- Keadilan Ekologis: Mewujudkan keadilan ekologis di mana manfaat dari penggunaan sumber daya alam dirasakan secara merata, dan dampak negatifnya tidak menimpa kelompok masyarakat tertentu saja. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal menjadi dasar dalam setiap kebijakan lingkungan.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

Berdasarkan pemahaman atas kondisi saat ini dan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik, ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi berikut:

- Peningkatan Patroli dan Pengawasan di Kawasan Hutan: Melakukan patroli rutin dan pengawasan di kawasan hutan, terutama di daerah-daerah rawan penebangan liar seperti Mentawai dan Bukit Barisan. Melibatkan masyarakat lokal dalam patroli untuk memperkuat sistem pengawasan.
- Pengembangan Skema Perhutanan Sosial: Mendorong implementasi skema perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penyediaan bantuan teknis dan pendanaan untuk program perhutanan sosial.
- Penegakan Hukum yang Ketat Terhadap Pelanggaran Lingkungan: Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan memperkuat regulasi untuk menindak pelanggaran lingkungan, baik oleh perusahaan maupun individu. Pembentukan unit khusus untuk penegakan hukum lingkungan dapat menjadi solusi.
- Kampanye Edukasi Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat: Melaksanakan kampanye edukasi yang masif tentang pentingnya pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan praktik pertanian berkelanjutan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pelestarian alam.
- Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Memadai: Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan TPA, fasilitas daur ulang, dan pengolahan limbah yang modern. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

Rembuk Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan bukan hanya soal menjaga keindahan alam, tetapi juga tentang memastikan masa depan yang aman dan sejahtera bagi semua. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan nyata, Sumatera Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Kami percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, dan generasi muda siap memimpin langkah-langkah tersebut menuju Sumatera Barat yang lebih baik.

Ekonomi, Pengangguran Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Sumatera Barat

Sumatera Barat, dengan kekayaan alam dan budayanya, berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kenyataan yang dihadapi provinsi ini berbeda. Tantangan ekonomi seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi momok bagi kesejahteraan masyarakat. Isu ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan di Sumatera Barat.

Permasalahan

Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Barat menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan:

- **Tingginya Angka Pengangguran dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan:** Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional. Terutama di kalangan pemuda, pengangguran masih menjadi isu serius. Minimnya investasi dalam sektor industri dan ketergantungan pada sektor pertanian tradisional membuat penciptaan lapangan kerja baru sangat terbatas. Banyak lulusan perguruan tinggi yang sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, menyebabkan fenomena brain drain atau emigrasi tenaga kerja terdidik ke provinsi atau negara lain.
- **Kemiskinan yang Merata di Daerah Pedesaan dan Perkotaan:** Meskipun memiliki potensi pertanian yang besar, banyak wilayah pedesaan di Sumatera Barat masih berada di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor seperti akses pasar yang terbatas, ketidakpastian harga komoditas, dan kurangnya infrastruktur dasar memperparah keadaan. Di perkotaan, masalah kemiskinan diperparah oleh urbanisasi yang tidak terkontrol, di mana banyak penduduk desa pindah ke kota dengan harapan menemukan pekerjaan, namun akhirnya tinggal di daerah kumuh tanpa akses yang memadai terhadap layanan dasar.
- **Rendahnya Upah Minimum Regional (UMR):** Banyak pekerja di Sumatera Barat yang mendapatkan upah di bawah kebutuhan hidup layak. UMR yang rendah ini tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Rendahnya UMR sering kali disebabkan oleh lemahnya regulasi tenaga kerja dan kurangnya kemampuan negosiasi pekerja dengan pengusaha.
- **Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Perekonomian:** Alih fungsi lahan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk wilayah pesisir dan hutan di Sumatera Barat, berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat. Kerusakan ekosistem laut mengurangi hasil tangkapan nelayan, sementara kerusakan hutan mengganggu produksi kayu dan produk hutan lainnya. Ketika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian, hal ini merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut.



- Dampak Judi Online dan Penyalahgunaan Teknologi: Judi online menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Sumatera Barat, terutama di kalangan anak muda. Ketergantungan pada judi online bukan hanya merusak mental dan sosial, tetapi juga menguras sumber daya finansial keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi lokal.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Melihat situasi ekonomi yang mendesak ini, ROMPI Sumatera Barat menyerukan tindakan konkret dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ketenagakerjaan:

- Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pendidikan formal dan informal di Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan keterampilan yang berorientasi pada industri kreatif, teknologi informasi, dan pengembangan UMKM harus diperluas. Kurikulum pendidikan harus diubah untuk menekankan keterampilan praktis dan kewirausahaan, sehingga lulusan memiliki kemampuan yang relevan untuk bersaing di pasar kerja.
- Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru: Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian berkelanjutan. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dalam pembukaan usaha baru harus dilakukan untuk menarik lebih banyak investor lokal dan asing. Selain itu, pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
- Revisi Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR): Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan UMR di Sumatera Barat agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Revisi ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi, biaya hidup, dan kebutuhan dasar pekerja. Peningkatan UMR juga akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Perlindungan Terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut, yang pada akhirnya merugikan perekonomian daerah. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan harus ditingkatkan. Selain itu, program rehabilitasi lingkungan dan konservasi sumber daya alam perlu diperkuat.
- Program Sosialisasi dan Rehabilitasi untuk Pengguna Judi Online: Pemerintah harus melakukan kampanye edukasi tentang bahaya judi online dan menyediakan program rehabilitasi bagi mereka yang terjebak dalam ketergantungan. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini.



Visi Orang Muda Sumatera Barat

Generasi muda Sumatera Barat memandang bahwa perubahan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Mereka memiliki visi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan:

- **Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Kewirausahaan:** Mendorong pemuda untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi lokal melalui inisiatif kewirausahaan. Program pelatihan dan inkubasi bisnis perlu dikembangkan untuk membantu pemuda memulai dan mengembangkan usaha mereka. Pemuda harus didorong untuk menciptakan solusi inovatif bagi masalah-masalah lokal, seperti pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan teknologi informasi.
- **Ekonomi Berbasis Komunitas dan Kearifan Lokal:** Mengembangkan ekonomi berbasis komunitas yang memanfaatkan potensi lokal, seperti produk kerajinan, pertanian organik, dan ekowisata. Kearifan lokal dan budaya Minangkabau harus diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat.
- **Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan:** Pemuda harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan. Mereka perlu didengar dalam forum-forum publik dan kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan solusi yang holistik dan inklusif.
- **Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui Pendidikan Vokasi:** Pendidikan vokasi yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis harus diperluas. Pemuda perlu diberikan akses ke pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera

Berdasarkan analisis situasi dan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik, ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi berikut:

- **Meningkatkan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Mengembangkan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meningkatkan akses ke pelatihan keterampilan untuk pemuda, terutama di daerah pedesaan, dengan fokus pada teknologi, pertanian berkelanjutan, dan industri kreatif.
- **Dukungan Terhadap UMKM dan Kewirausahaan:** Menyediakan skema pendanaan yang mudah diakses untuk UMKM dan startup, termasuk pelatihan manajemen dan akses pasar. Mendorong pengembangan koperasi dan usaha bersama berbasis nagari untuk memperkuat ekonomi lokal.
- **Penetapan Kebijakan Upah Minimum yang Adil:** Meninjau kembali dan menyesuaikan UMR di Sumatera Barat agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat dalam proses penetapan UMR untuk memastikan keadilan dan transparansi.

- Program Rehabilitasi Ekonomi untuk Masyarakat yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan: Membangun program rehabilitasi ekonomi untuk masyarakat yang mata pencahariannya terpengaruh oleh kerusakan lingkungan, termasuk pelatihan ulang dan diversifikasi sumber pendapatan.
- Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah, Sektor Swasta, dan Komunitas Lokal: Membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melibatkan pemuda dalam inisiatif pembangunan ekonomi melalui partisipasi aktif dan dukungan terhadap usaha-usaha yang dikelola oleh pemuda.
- Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan: Meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi.

Resolusi ini mencerminkan komitmen kuat dari pemuda Sumatera Barat untuk berkontribusi dalam memulihkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, visi ini dapat diwujudkan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Sumatera Barat dan Indonesia.

Pendidikan di Sumatera Barat

Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya dan sejarah, menghadapi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Meski pemerintah telah mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai. Pendidikan menjadi kunci penting dalam membentuk generasi muda yang berdaya dan peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Namun, tantangan dalam sistem pendidikan yang ada mengancam masa depan generasi tersebut.

Permasalahan

Beberapa masalah pendidikan yang diidentifikasi dalam diskusi ROMPI Sumatera Barat mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga kurikulum:

- Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata: Ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu utama di Sumatera Barat. Di daerah terpencil dan tertinggal (3T), seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, banyak sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas. Buku pelajaran yang memadai, laboratorium, dan teknologi pembelajaran modern sering kali menjadi barang langka. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah ini, berbanding terbalik dengan apa yang didapat oleh siswa di perkotaan.

- Kurangnya Kesadaran tentang Isu Lingkungan: Sistem pendidikan di Sumatera Barat masih belum sepenuhnya mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam kurikulum. Padahal, provinsi ini kerap mengalami bencana ekologis seperti banjir dan longsor, yang sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Kurangnya pendidikan tentang pelestarian alam dan keadilan ekologis membuat generasi muda kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
- Tidak Adanya Pendidikan Seks dan Rendahnya Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi: Di banyak sekolah, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi masih menjadi tabu. Kurangnya informasi yang tepat mengenai masalah ini telah mengakibatkan tingginya angka pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja. Hal ini diperparah dengan tidak adanya program pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan sesuai usia di sekolah-sekolah.
- Bullying dan Kenakalan Remaja: Bullying di lingkungan sekolah menjadi isu yang kian serius. Banyak siswa yang mengalami kekerasan fisik maupun verbal, yang berdampak pada kesehatan mental dan motivasi belajar mereka. Kurangnya pengawasan dan program anti-bullying di sekolah-sekolah membuat masalah ini semakin sulit diatasi.
- Biaya Pendidikan yang Tinggi: Meski pemerintah telah mengupayakan pendidikan gratis hingga tingkat SMA, biaya pendidikan di perguruan tinggi masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Tingginya biaya kuliah dan kurangnya beasiswa menyebabkan banyak siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa menghentikan pendidikan mereka setelah SMA.
- Rendahnya Keterampilan Teknologi di Kalangan Guru: Banyak guru di Sumatera Barat, terutama di daerah pedesaan, masih kurang terampil dalam penggunaan teknologi. Hal ini menghambat implementasi kurikulum berbasis digital dan pembelajaran jarak jauh, terutama selama pandemi COVID-19 yang lalu.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Masalah Pendidikan

Melihat berbagai permasalahan ini, ROMPI Sumatera Barat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan:

- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil: Pemerintah pusat dan daerah harus memperluas program penyediaan guru ke daerah terpencil dengan menawarkan insentif yang layak bagi mereka yang bersedia mengajar di daerah 3T. Pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan juga perlu diprioritaskan agar siswa di daerah terpencil mendapatkan pengalaman belajar yang layak dan setara.
- Integrasi Isu Lingkungan dan Pendidikan Seks dalam Kurikulum: Kurikulum nasional dan daerah perlu disesuaikan untuk memasukkan materi tentang keadilan ekologis, pelestarian lingkungan, serta pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak perilaku mereka terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri.



- Pengembangan Program Anti-Bullying dan Kesehatan Mental: Pemerintah dan sekolah harus mengembangkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan program dukungan kesehatan mental bagi siswa. Edukasi tentang bahaya bullying dan kenakalan remaja harus diintensifkan melalui kerja sama antara sekolah, komunitas, dan keluarga.
- Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer, dengan memperjelas status mereka dan memberikan upah yang layak. Pelatihan teknologi bagi guru juga harus ditingkatkan agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih inovatif dan efektif.
- Mengurangi Biaya Pendidikan dan Meningkatkan Akses Beasiswa: Program beasiswa harus ditingkatkan untuk siswa berprestasi dan siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memandang pendidikan sebagai alat penting untuk perubahan sosial dan perlindungan lingkungan. Mereka memiliki visi untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan:

- Pendidikan sebagai Alat Perubahan Sosial: Pendidikan harus menjadi sarana untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, dan keadilan sosial, serta mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia dan kewajiban sosial.
- Pendidikan yang Berbasis Keadilan Ekologis: Pendidikan tidak hanya tentang keterampilan akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kesadaran lingkungan. Pemuda ingin melihat sekolah-sekolah di Sumatera Barat mengajarkan nilai-nilai keadilan ekologis dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sekolah harus berfungsi sebagai pusat komunitas yang mendukung keberlanjutan, seperti mengelola kebun sekolah dan mempromosikan program daur ulang.
- Pendidikan yang Menyiapkan Siswa untuk Masa Depan: Kurikulum perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa siswa siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk teknologi digital, ekonomi hijau, dan pekerjaan di industri kreatif. Pendidikan vokasi dan keterampilan kerja perlu dikembangkan untuk memberikan siswa keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja.
- Sekolah sebagai Tempat Aman dan Inklusif: Orang muda menginginkan sekolah yang bebas dari bullying, diskriminasi, dan kekerasan. Mereka mendukung inisiatif yang menjadikan sekolah sebagai tempat aman bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka.



Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

Berdasarkan diskusi dan analisis mendalam, berikut adalah resolusi yang diusulkan oleh ROMPI Sumatera Barat untuk meningkatkan pendidikan di provinsi ini:

- Penyediaan Insentif bagi Guru di Daerah Terpencil: Meningkatkan insentif finansial dan non-finansial bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Program ini dapat mencakup tunjangan khusus, perumahan, dan pengakuan profesional.
- Reformasi Kurikulum dengan Fokus pada Isu Lingkungan dan Pendidikan Seks: Memasukkan pelajaran tentang lingkungan hidup dan pendidikan seks ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Kurikulum ini harus dirancang dengan pendekatan yang sesuai usia dan relevan dengan konteks lokal.
- Peningkatan Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak di semua sekolah, termasuk akses internet, laboratorium, perpustakaan, dan alat bantu belajar yang modern. Pemerintah juga harus mempercepat program elektrifikasi dan konektivitas digital di daerah pedesaan dan terpencil.
- Program Pelatihan Berkelanjutan untuk Guru: Menyediakan pelatihan rutin bagi guru dalam penggunaan teknologi pendidikan dan metodologi pengajaran yang inovatif. Guru juga harus dilatih untuk mengenali dan menangani kasus bullying serta mendukung kesehatan mental siswa.
- Penguatan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Memperluas program beasiswa untuk mencakup lebih banyak siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta mendukung pendidikan di perguruan tinggi dan program pelatihan kejuruan.
- Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Lokal: Memperkuat kerjasama dengan LSM dan komunitas lokal untuk menyediakan pendidikan alternatif dan program literasi bagi anak-anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Inisiatif ini sangat relevan di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai.

Resolusi ini mencerminkan komitmen dan aspirasi pemuda Sumatera Barat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, pendidikan dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Sumatera Barat.

Sosial Budaya di Sumatera Barat

Sumatera Barat, dikenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadatnya, menghadapi sejumlah tantangan sosial budaya yang kompleks. Perubahan sosial, dampak modernisasi, dan pengaruh teknologi mengancam nilai-nilai lokal dan identitas budaya masyarakat. Di tengah upaya pelestarian budaya dan pembinaan karakter, beberapa isu mendesak seperti kenakalan remaja, masalah kesehatan mental, dan dampak teknologi menjadi perhatian utama.



Permasalahan

Sumatera Barat mengalami berbagai masalah sosial budaya yang memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu utama meliputi:

- **Bullying dan Kenakalan Remaja:** Kasus bullying di sekolah dan kenakalan remaja seperti tawuran semakin meningkat. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perilaku ini serta minimnya intervensi yang efektif dari pihak sekolah dan keluarga menyebabkan penurunan kesehatan mental di kalangan anak muda.
- **Kehilangan Orientasi di Kalangan Anak Muda:** Banyak anak muda mengalami krisis identitas dan kehilangan orientasi hidup akibat lemahnya institusi sosial yang seharusnya memberikan bimbingan dan dukungan. Modernisasi dan tekanan sosial sering kali membuat mereka merasa kehilangan arah.
- **Pengaruh Teknologi yang Berlebihan:** Fenomena "fear of missing out" (FOMO) dan distraksi akibat perkembangan teknologi mengganggu keseimbangan hidup anak muda. Penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak pada kesehatan mental dan hubungan sosial mereka.
- **Kurangnya Pemahaman tentang Kesehatan Mental:** Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, sering kali kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang kesehatan mental. Stigma terhadap masalah kesehatan mental menghambat akses terhadap bantuan dan dukungan yang diperlukan.
- **Penyebaran Perjudian Slot Online:** Judi online, khususnya perjudian slot, menjadi masalah serius yang berdampak pada ekonomi keluarga dan kesehatan mental. Pengaruh negatif dari perjudian online ini perlu diatasi dengan langkah-langkah pencegahan dan edukasi.
- **Apatisme Mahasiswa:** Banyak mahasiswa menunjukkan apatisme terhadap isu-isu sosial dan politik. Kurangnya motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik mengurangi peran aktif mereka dalam masyarakat.
- **Kesulitan dalam Pendirian Rumah Ibadah:** Di beberapa daerah, proses pendirian rumah ibadah mengalami kendala administratif dan sosial, yang dapat memicu ketegangan antaragama.
- **Lunturnya Nilai Budaya Lokal:** Modernisasi dan globalisasi menyebabkan nilai-nilai budaya lokal, seperti adat istiadat dan tradisi, semakin terabaikan. Generasi muda kurang mengetahui dan menghargai warisan budaya mereka.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan kepada berbagai pihak untuk menangani masalah sosial budaya dengan langkah-langkah yang konkret dan inklusif:

- **Pendidikan Karakter dan Sosial di Sekolah:** Pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kesadaran sosial,

dan kesehatan mental di sekolah. Program anti-bullying dan pencegahan kenakalan remaja harus menjadi bagian dari pendidikan formal.

- Kampanye dan Pendidikan Kesehatan Mental: Melakukan kampanye yang lebih intensif mengenai kesehatan mental di sekolah dan masyarakat. Menyediakan akses yang lebih baik untuk layanan konseling dan dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan.
- Peningkatan Sosialisasi Budaya Lokal: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menghidupkan kembali dan mempromosikan tradisi lokal, seperti "babalik ka surau" dan mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM), sebagai bagian dari kurikulum. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lokal.
- Pengawasan dan Regulasi Terhadap Judi Online: Menyusun dan menerapkan kebijakan yang ketat untuk mengawasi dan membatasi akses ke perjudian online. Kampanye edukasi tentang bahaya perjudian juga perlu digalakkan.
- Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadah: Menyederhanakan prosedur pendirian rumah ibadah dan menyediakan dukungan bagi komunitas yang ingin membangun fasilitas ibadah, dengan memastikan bahwa hak-hak kebebasan beragama dihormati.
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Kesehatan Mental: Melakukan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental dan cara-cara menangani masalah kesehatan mental secara efektif.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera dengan menekankan pada pelestarian budaya, peningkatan kesejahteraan sosial, dan keseimbangan antara modernisasi dan kearifan lokal:

- Harmoni antara Modernisasi dan Budaya Lokal: Masyarakat harus menemukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya lokal. Orang muda ingin melihat tradisi dan adat istiadat diintegrasikan dalam kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar mereka.
- Pendidikan dan Pembinaan Karakter: Pendidikan harus tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga pada pembinaan karakter dan kesadaran sosial. Melalui program pendidikan yang komprehensif, generasi muda diharapkan dapat mengembangkan sikap empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap komunitas.
- Kesehatan Mental dan Dukungan Sosial: Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke layanan kesehatan mental dan dukungan sosial yang memadai. Mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental dan mempromosikan budaya dukungan di lingkungan sosial.
- Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan: Memberikan ruang bagi pemuda untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan sosial, sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung dalam perbaikan masyarakat.



Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

Berdasarkan diskusi dan analisis mendalam, ROMPI Sumatera Barat menyusun resolusi untuk mengatasi permasalahan sosial budaya sebagai berikut:

- Pengembangan Program Pendidikan Karakter: Memperkenalkan dan mengintegrasikan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai budaya, kesadaran sosial, dan kesehatan mental di semua tingkat pendidikan. Kurikulum harus mencakup pelajaran tentang nilai-nilai lokal, tanggung jawab sosial, dan empati.
- Kampanye Sosialisasi Budaya dan Kesehatan Mental: Mengadakan kampanye sosialisasi tentang pentingnya melestarikan budaya lokal dan memahami kesehatan mental. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, media, dan lembaga pendidikan dalam upaya ini.
- Fasilitasi dan Dukungan Pendirian Rumah Ibadah: Menyediakan bantuan dan dukungan untuk pendirian rumah ibadah, termasuk penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif bagi pembangunan rumah ibadah yang mendukung keberagaman agama.
- Regulasi dan Edukasi Terhadap Judi Online: Menerapkan regulasi yang ketat untuk perjudian online dan meluncurkan program edukasi yang menargetkan risiko dan dampak perjudian, dengan dukungan untuk program rehabilitasi bagi yang terlibat.
- Peningkatan Program Pelatihan untuk Guru dan Pengawas Sekolah: Menyediakan pelatihan untuk guru dan pengawas sekolah tentang cara menangani bullying, mengintegrasikan pendidikan karakter, dan memahami dinamika sosial anak muda.
- Penguatan Kearifan Lokal dalam Pendidikan: Menghidupkan kembali dan memperkuat mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) serta kegiatan yang mempromosikan tradisi dan adat lokal di sekolah-sekolah.
- Pengembangan Program Pemberdayaan Pemuda: Membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang fokus pada pengembangan keterampilan, partisipasi sosial, dan kontribusi terhadap kebijakan publik.

Resolusi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan di Sumatera Barat, di mana nilai-nilai budaya lokal dihormati dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

Kesehatan di Sumatera Barat

Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Isu-isu kesehatan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keadilan ekologis. Permasalahan kesehatan yang ada mencakup kurangnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil, dampak kesehatan dari perilaku kenakalan remaja, serta masalah kesehatan mental yang semakin mengemuka.



Permasalahan

Sumatera Barat menghadapi sejumlah masalah kesehatan yang signifikan, di antaranya:

- **Kurangnya Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil:** Daerah-daerah terpencil di Sumatera Barat sering kali kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dasar mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat dan tingginya angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.
- **Masalah Kesehatan Mental Akibat Bullying:** Bullying di sekolah menyebabkan dampak serius pada kesehatan mental siswa. Stigma terhadap masalah kesehatan mental menghambat individu untuk mencari bantuan yang diperlukan, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya.
- **Dampak Kesehatan dari Kenakalan Remaja:** Perilaku kenakalan remaja, termasuk pernikahan dini dan penyebaran penyakit menular seksual (PMS), merupakan masalah kesehatan yang serius. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai di sekolah memperburuk situasi ini, dengan dampak jangka panjang pada kesehatan reproduksi remaja.
- **Kurangnya Kesadaran Akan Kebersihan di Tempat Umum:** Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kebersihan di tempat umum, seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah, menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit menular. Pencemaran lingkungan, termasuk sampah yang menumpuk dan air yang tercemar, semakin memperburuk situasi ini.
- **Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan:** Pencemaran udara, air, dan tanah yang berasal dari aktivitas industri dan deforestasi berdampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, dan penyakit kronis lainnya menjadi semakin umum di daerah yang terkena dampak pencemaran.
- **Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak:** Kematian ibu dan anak saat melahirkan masih menjadi masalah serius di beberapa daerah. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan layanan prenatal yang tidak optimal berkontribusi pada tingginya angka kematian ini.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan kepada berbagai pihak untuk menangani masalah kesehatan secara holistik dan terintegrasi:

- **Peningkatan Infrastruktur Kesehatan di Daerah Terpencil:** Pemerintah harus memperluas akses ke layanan kesehatan dengan membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan meningkatkan distribusi tenaga medis. Pengembangan sistem telemedicine juga bisa menjadi solusi untuk daerah yang sangat sulit dijangkau.
- **Integrasi Pendidikan Seks dan Kesehatan Mental dalam Kurikulum:** Pendidikan seks yang komprehensif dan sesuai usia perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah untuk mencegah pernikahan dini dan penyebaran PMS. Pendidikan kesehatan mental juga harus

dimasukkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang kesehatan mental.

- Kampanye Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan: Meluncurkan kampanye kesehatan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan pribadi dan lingkungan. Program sosialisasi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan pesan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Tempat Umum: Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di tempat umum, seperti pasar dan area publik, untuk menangani masalah kesehatan masyarakat. Memastikan fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat cuci tangan dan fasilitas sanitasi, di lokasi-lokasi strategis.
- Penanganan Pencemaran Lingkungan: Pemerintah harus menangani masalah pencemaran lingkungan dengan kebijakan yang lebih ketat dan pelaksanaan yang efektif. Mengurangi polusi udara, air, dan tanah untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
- Program Kesehatan Reproduksi dan Prenatal: Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan prenatal, serta menyediakan dukungan yang memadai untuk ibu hamil dan bayi baru lahir. Mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan memperbaiki kualitas layanan kesehatan maternal.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi ini mencakup:

- Akses Kesehatan yang Merata dan Berkualitas: Setiap individu, tanpa memandang lokasi geografis, harus memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil dan terpencil menjadi prioritas utama.
- Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan: Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama remaja, tentang kesehatan seksual, kesehatan mental, dan kebersihan lingkungan melalui pendidikan dan kampanye yang menyeluruh.
- Lingkungan yang Sehat dan Berkelanjutan: Memastikan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kesehatan masyarakat. Menangani pencemaran lingkungan dan mempromosikan praktek-praktek yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
- Kesehatan Mental sebagai Prioritas: Mengakui dan menangani kesehatan mental sebagai komponen penting dari kesehatan secara keseluruhan. Memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk kesehatan mental di semua tingkat pendidikan dan masyarakat.



Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

Berdasarkan diskusi dan analisis, ROMPI Sumatera Barat menyusun resolusi untuk mengatasi masalah kesehatan sebagai berikut:

- Pengembangan Infrastruktur Kesehatan: Membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta memastikan adanya tenaga medis yang cukup. Memanfaatkan teknologi seperti telemedicine untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau.
- Integrasi Pendidikan Seks dan Kesehatan Mental: Menyusun kurikulum pendidikan seks yang sesuai usia dan mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental di sekolah. Memberikan pelatihan bagi guru untuk mendukung implementasi kurikulum ini.
- Kampanye Kesehatan dan Kebersihan: Meluncurkan kampanye edukasi tentang pentingnya kebersihan pribadi dan lingkungan di sekolah dan masyarakat. Mengedukasi tentang bahaya pencemaran lingkungan dan cara menjaga kesehatan.
- Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Tempat Umum: Mendirikan fasilitas kesehatan dan kebersihan di tempat umum untuk memastikan akses yang memadai bagi masyarakat. Memastikan adanya fasilitas sanitasi yang layak dan tempat cuci tangan di area publik.
- Penanganan Pencemaran Lingkungan: Mengimplementasikan kebijakan yang ketat untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Menyusun rencana aksi untuk mengatasi dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat.
- Dukungan untuk Kesehatan Reproduksi dan Maternal: Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan prenatal untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Menyediakan dukungan dan sumber daya untuk ibu hamil dan bayi baru lahir.
- Program Kesehatan Mental: Mengembangkan program kesehatan mental yang melibatkan sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan.

Resolusi ini bertujuan untuk memastikan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat ditangani secara holistik, dengan memperhatikan keadilan ekologis dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Infrastruktur dan Tata Ruang

Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan budaya dan keindahan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan serius terkait infrastruktur dan tata ruang. Pembangunan yang tidak merata, kekurangan fasilitas publik, serta dampak lingkungan dari proses pembangunan menjadi isu-isu utama yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Narasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah-masalah tersebut secara komprehensif dan mengaitkannya dengan prinsip keadilan ekologis.



Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang

- Kurangnya Infrastruktur di Daerah Terpencil: Banyak daerah terpencil di Sumatera Barat, seperti Kepulauan Mentawai dan beberapa kawasan pedalaman, masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Keterbatasan ini menghambat aksesibilitas dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.
- Minimnya Fasilitas Publik yang Memadai: Fasilitas publik seperti taman, pusat olahraga, dan ruang terbuka hijau masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kurangnya ruang rekreasi dan aktivitas sosial yang memadai bagi masyarakat.
- Pembangunan Daerah Pinggiran yang Tidak Merata: Pembangunan infrastruktur sering kali terpusat di area perkotaan, meninggalkan daerah pinggiran dan terpencil dengan sedikit perhatian. Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
- Parkir Liar di Kawasan Taplau Padang: Masalah parkir liar di kawasan Taplau Padang mengakibatkan kemacetan dan dampak negatif pada lingkungan. Pengelolaan parkir yang tidak terorganisir memperburuk masalah lalu lintas dan pencemaran udara.
- Pembangunan yang Tidak Memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan: Banyak proyek pembangunan tidak disertai dengan analisis dampak lingkungan yang memadai. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran, yang berdampak pada ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat.
- Keterbatasan Lapangan Pekerjaan Akibat Infrastruktur yang Kurang Berkembang: Kekurangan infrastruktur yang memadai menghambat perkembangan ekonomi lokal dan menciptakan kesulitan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Infrastruktur yang buruk mengurangi daya tarik investasi dan pengembangan usaha lokal.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menangani masalah infrastruktur dan tata ruang dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan:

- Perencanaan Pembangunan yang Inklusif: Pemerintah perlu memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencakup semua daerah, termasuk pinggiran dan terpencil. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Pastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur memperhatikan prinsip keberlanjutan dan dampak lingkungan. Setiap proyek harus disertai dengan analisis dampak lingkungan yang komprehensif untuk mencegah kerusakan ekosistem.
- Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal dan aspirasi

komunitas tercermin dalam rencana pembangunan. Forum-forum diskusi publik dan konsultasi komunitas harus diadakan secara rutin.

- **Penataan Parkir dan Fasilitas Publik:** Mengatasi masalah parkir liar dengan merancang sistem parkir yang terorganisir dan membangun fasilitas parkir yang memadai. Pengembangan ruang publik yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- **Prioritas untuk Daerah Terpencil:** Memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur di daerah terpencil untuk memastikan akses yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan-kawasan tersebut.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan sistem infrastruktur dan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Visi ini mencakup:

- **Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas:** Setiap daerah, termasuk terpencil dan pinggiran, harus mendapatkan akses yang adil terhadap pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- **Tata Ruang yang Berkelanjutan:** Menyusun tata ruang wilayah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan.
- **Partisipasi Aktif Masyarakat:** Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur. Masyarakat harus memiliki suara dalam menentukan prioritas dan keputusan pembangunan.
- **Pengelolaan Parkir yang Efisien dan Ramah Lingkungan:** Mengatasi masalah parkir dengan solusi yang ramah lingkungan dan terorganisir. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai untuk mengurangi kemacetan dan pencemaran.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi untuk mengatasi masalah infrastruktur dan tata ruang sebagai berikut:

- **Peningkatan Infrastruktur di Daerah Terpencil:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
- **Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan:** Mengadopsi pendekatan tata ruang yang berkelanjutan dan inklusif. Setiap proyek pembangunan harus disertai dengan analisis dampak lingkungan yang menyeluruh dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
- **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan:** Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang. Mengadakan forum-forum diskusi dan konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi.



- Penataan Parkir dan Fasilitas Publik: Merancang sistem parkir yang efisien dan membangun fasilitas parkir yang memadai untuk mengurangi masalah parkir liar. Meningkatkan fasilitas publik seperti taman, pusat olahraga, dan ruang terbuka hijau.
- Pengawasan dan Penegakan Aturan Tata Ruang: Menegakkan aturan tata ruang dengan ketat untuk mencegah pembangunan yang merusak lingkungan. Memastikan bahwa semua proyek pembangunan mematuhi regulasi lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem.
- Program Pengembangan Ekonomi Lokal: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan. Memfasilitasi investasi dan usaha lokal dengan infrastruktur yang memadai.

Resolusi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di Sumatera Barat.

Kebencanaan

Sumatera Barat, sebagai wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kebencanaan. Isu-isu seperti kurangnya kapasitas pemuda dalam penanggulangan bencana, perlindungan kelompok rentan, dan manajemen bencana yang tidak efektif merupakan masalah utama yang perlu segera diatasi. Narasi ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan kebencanaan secara komprehensif, mengaitkannya dengan prinsip keadilan ekologis, dan mengusulkan solusi yang berkelanjutan.

Permasalahan

- Kurangnya Kapasitas Pemuda dalam Penanggulangan Bencana: Pemuda sering kali belum mendapatkan pelatihan atau fasilitasi yang memadai dalam penanggulangan bencana. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan keterbatasan dalam upaya mitigasi dan respons terhadap bencana.
- Perlindungan Kelompok Rentan Saat Bencana: Kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai selama bencana. Kurangnya perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka dapat meningkatkan risiko dan kerugian yang mereka alami.
- Manajemen Bencana yang Kurang Efektif: Manajemen bencana di Sumatera Barat sering kali mengalami kendala dalam koordinasi, kesiapsiagaan, dan respons yang cepat. Sistem peringatan dini dan upaya mitigasi masih perlu diperkuat untuk mengurangi dampak bencana.



- Kurangnya Mitigasi Bencana: Upaya mitigasi bencana masih minim, terutama di daerah rawan. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti sistem drainase dan dinding penahan longsor, memperburuk dampak bencana.
- Kesiapsiagaan yang Lemah: Kurangnya pelatihan dan simulasi bencana menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi bencana secara efektif. Kesiapsiagaan yang rendah dapat memperpanjang proses pemulihan dan meningkatkan kerugian.

Desakan kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanggulangan bencana sebagai berikut:

- Peningkatan Pelatihan dan Kapasitas Pemuda: Pemerintah harus menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan bencana secara rutin untuk pemuda. Ini termasuk pelatihan keterampilan penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif dalam simulasi bencana.
- Fasilitasi Perlindungan Kelompok Rentan: Merancang dan menerapkan kebijakan perlindungan khusus untuk kelompok rentan selama bencana. Ini termasuk penyediaan fasilitas dan bantuan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- Perbaikan Manajemen Bencana: Memperkuat sistem manajemen bencana dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperbaiki sistem peringatan dini, dan memperkuat respon cepat terhadap bencana. Rencana kontinjensi harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.
- Peningkatan Upaya Mitigasi Bencana: Meningkatkan investasi dalam infrastruktur mitigasi bencana seperti sistem drainase, dinding penahan longsor, dan rencana tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana.
- Peningkatan Kesadaran dan Kesiapsiagaan: Melakukan kampanye kesadaran publik tentang mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Mengadakan simulasi bencana secara berkala untuk mempersiapkan masyarakat.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat dan inklusif:

- Kesiapsiagaan Komunitas yang Terintegrasi: Menyusun rencana penanggulangan bencana yang melibatkan semua elemen masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pemuda dan perlindungan kelompok rentan.
- Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan bencana, sehingga pemuda dan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana.

- **Infrastruktur Mitigasi yang Berkelanjutan:** Mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan dan sosial.
- **Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana:** Memastikan bahwa pemuda dan masyarakat lokal terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi untuk mengatasi masalah kebencanaan sebagai berikut:

- **Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Bencana:** Menyelenggarakan pelatihan rutin dan simulasi bencana bagi pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Program ini harus mencakup keterampilan praktis dan teori mengenai penanggulangan bencana.
- **Fasilitasi Perlindungan Kelompok Rentan:** Mengimplementasikan kebijakan perlindungan khusus untuk kelompok rentan selama bencana, termasuk penyediaan fasilitas evakuasi dan bantuan yang sesuai.
- **Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana:** Investasi dalam pembangunan infrastruktur mitigasi seperti sistem drainase yang efektif, dinding penahan longsor, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
- **Perbaikan Sistem Manajemen Bencana:** Memperkuat sistem manajemen bencana dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperbaiki sistem peringatan dini, dan memperkuat respons cepat. Rencana kontinjensi harus melibatkan masyarakat lokal.
- **Kampanye Kesadaran dan Kesiapsiagaan:** Melakukan kampanye kesadaran tentang mitigasi bencana dan kesiapsiagaan melalui berbagai media dan kegiatan komunitas. Mengadakan simulasi bencana secara berkala untuk memastikan masyarakat siap menghadapi situasi darurat.
- **Partisipasi Aktif dalam Perencanaan Bencana:** Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal dipertimbangkan.

Resolusi ini bertujuan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, terlindungi dengan baik selama bencana. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respons masyarakat di Sumatera Barat.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, menghadapi berbagai tantangan yang menghambat akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan utama melibatkan diskriminasi dalam pelayanan sosial berdasarkan kekayaan, status sosial, usia, dan kepemilikan BPJS. Isu ini terkait erat dengan prinsip keadilan ekologis, di mana akses terhadap layanan dasar harus dipertimbangkan dalam konteks keberagaman dan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan

- **Diskriminasi dalam Pelayanan Sosial:** Di Kota Padang, terdapat laporan mengenai diskriminasi dalam pelayanan publik berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, status sosial, usia, dan kepemilikan BPJS. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan sosial dan kesehatan.
- **Akses Terbatas ke Pelayanan Kesehatan:** Meskipun BPJS diharapkan untuk menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, banyak orang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
- **Ketidakadilan dalam Layanan Sosial:** Pelayanan sosial sering kali tidak merata, dengan kelompok masyarakat tertentu mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Ini mencakup akses ke program bantuan sosial, layanan kesejahteraan, dan fasilitas publik.
- **Keterbatasan Transparansi dan Akuntabilitas:** Sistem pengaduan dan pengawasan terhadap pelayanan publik masih lemah, mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus diskriminasi dan pelayanan yang tidak memadai.
- **Pendidikan dan Pelatihan Petugas Layanan Publik:** Banyak petugas pelayanan publik yang kurang mendapatkan pelatihan mengenai etika pelayanan dan standar profesional, sehingga berpotensi menyebabkan diskriminasi dan pelayanan yang tidak konsisten.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan berikut kepada pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik:

- **Peningkatan Pelatihan Profesionalitas dan Etika Pelayanan Publik:** Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas layanan publik untuk memastikan mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam pelayanan.
- **Penerapan Standar Pelayanan Publik yang Inklusif dan Adil:** Merancang dan menerapkan standar pelayanan publik yang memastikan akses adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang kekayaan, status sosial, usia, atau kepemilikan BPJS.

- Pengembangan Sistem Pengaduan dan Pengawasan yang Transparan: Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses dan pengawasan yang ketat terhadap praktik diskriminasi dalam pelayanan publik. Ini termasuk tindak lanjut yang efektif terhadap laporan pelanggaran.
- Peningkatan Akses ke Pelayanan Kesehatan dan Sosial: Menjamin akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih adil dan inklusif dengan menekankan pada beberapa hal berikut:

- Pelayanan Publik yang Tidak Diskriminatif: Menjamin bahwa semua warga, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Fokus pada penciptaan sistem pelayanan yang bebas dari diskriminasi berdasarkan kekayaan, status sosial, usia, atau kepemilikan BPJS.
- Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik: Mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas terhadap tindakan petugas layanan publik.
- Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petugas: Memberikan pelatihan yang komprehensif bagi petugas layanan publik mengenai etika dan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan: Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pelayanan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka dipertimbangkan.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi untuk mengatasi masalah pelayanan publik sebagai berikut:

- Pelatihan Etika dan Profesionalisme untuk Petugas: Mengadakan program pelatihan etika pelayanan publik bagi petugas layanan untuk memastikan pelayanan yang adil, inklusif, dan profesional. Ini termasuk pelatihan tentang penanganan kasus diskriminasi dan penegakan hak-hak masyarakat.
- Penerapan Standar Pelayanan yang Adil dan Tidak Diskriminatif: Merancang dan menerapkan standar pelayanan publik yang inklusif dan tidak diskriminatif. Standar ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai hak-hak masyarakat dan prosedur untuk mengatasi keluhan.
- Pengawasan dan Pengaduan yang Efektif: Membangun dan memperkuat sistem pengaduan dan pengawasan yang transparan untuk menangani kasus diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Sistem ini harus memastikan tindak lanjut yang efektif terhadap setiap laporan.

- Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan: Memastikan bahwa layanan kesehatan dan sosial tersedia dan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk peningkatan fasilitas dan infrastruktur di daerah terpencil dan untuk kelompok rentan.
- Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pelayanan: Melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan perencanaan pelayanan publik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
- Dengan resolusi ini, ROMPI Sumatera Barat bertujuan untuk membangun sistem pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan inklusif, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Informasi dan Hoaks

Di Sumatera Barat, isu penyebaran informasi hoaks dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan signifikan yang mempengaruhi keadilan sosial dan ekologis. Penyebaran hoaks sering kali menyebabkan kebingungan, polarisasi sosial, dan bahkan kerusakan lingkungan melalui penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai isu-isu ekologis. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat adalah akurat dan bermanfaat.

Permasalahan

- Penyebaran Hoaks yang Marak: Di Sumatera Barat, penyebaran hoaks masih menjadi masalah utama. Hoaks tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan sering kali menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya.
- Kurangnya Literasi Digital di Masyarakat: Sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat, terutama di daerah terpencil, masih kurang memahami cara membedakan antara informasi yang benar dan yang palsu. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi digital dan informasi.
- Misinformasi dan Disinformasi: Misinformasi dan disinformasi yang beredar menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, serta mengganggu pengambilan keputusan yang tepat terkait isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
- Polarisasi Sosial: Informasi yang salah sering kali memperburuk polarisasi sosial, memperdalam perpecahan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menghambat dialog konstruktif.
- Dampak Lingkungan: Hoaks yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dapat menyebabkan tindakan yang merugikan, seperti penebangan hutan ilegal atau pembuangan limbah sembarangan, akibat informasi yang salah mengenai kebijakan dan praktik lingkungan.



Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan berikut kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah informasi dan hoaks:

- **Peningkatan Edukasi Literasi Digital:** Mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan literasi digital di sekolah-sekolah, komunitas, dan melalui media massa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menangani hoaks.
- **Kampanye Anti-Hoaks:** Meluncurkan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoaks dan cara memverifikasi informasi, menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, radio, dan televisi.
- **Penegakan Hukum yang Lebih Tegas:** Menegakkan hukum dengan sanksi yang lebih tegas terhadap penyebar hoaks, termasuk pelaku yang menyebarkan informasi palsu yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
- **Peningkatan Keterlibatan Media:** Media harus berperan aktif dalam melawan penyebaran hoaks dengan menyajikan informasi yang akurat, melakukan verifikasi fakta, dan melaporkan penyebaran hoaks secara transparan.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berkelanjutan dengan menekankan beberapa hal berikut:

- **Masyarakat yang Teredukasi dan Kritis:** Menumbuhkan masyarakat yang lebih teredukasi dan kritis terhadap informasi yang mereka terima, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi sumber informasi.
- **Penguatan Infrastruktur Digital:** Meningkatkan infrastruktur digital untuk memfasilitasi akses informasi yang akurat dan terpercaya, serta mendukung upaya pendidikan literasi digital.
- **Keterlibatan dalam Kampanye Anti-Hoaks:** Mengajak orang muda untuk aktif terlibat dalam kampanye melawan hoaks, termasuk melalui media sosial, diskusi publik, dan kegiatan edukasi.
- **Kolaborasi dengan Media dan Pemerintah:** Mendorong kolaborasi antara media, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk menyusun strategi bersama dalam menangani masalah informasi dan hoaks.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi sebagai berikut untuk mengatasi masalah informasi dan hoaks:

- Pelaksanaan Program Edukasi Literasi Digital: Menyusun dan melaksanakan program edukasi literasi digital yang komprehensif di seluruh tingkat pendidikan dan komunitas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi dan mengenali hoaks.
- Kampanye Nasional Anti-Hoaks: Meluncurkan kampanye anti-hoaks yang melibatkan berbagai media dan platform untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoaks dan cara-cara efektif untuk memeriksa keakuratan informasi.
- Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Penyebar Hoaks: Memperketat penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks, dengan sanksi yang jelas dan tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
- Peningkatan Kualitas Media dan Verifikasi Fakta: Memastikan bahwa media massa menyajikan informasi yang akurat dan melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh sebelum publikasi. Ini termasuk pelatihan untuk jurnalis mengenai verifikasi fakta dan etika jurnalistik.
- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Informasi: Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan hoaks dan informasi yang salah melalui saluran pengaduan yang tersedia, serta melibatkan masyarakat dalam program-program edukasi dan kampanye.
- Pembangunan Infrastruktur Digital yang Mendukung: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur digital di seluruh Sumatera Barat untuk mendukung penyebaran informasi yang benar dan efektif.

Dengan resolusi ini, ROMPI Sumatera Barat berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas informasi di masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat dan bermanfaat, serta mampu membuat keputusan yang berdampak positif bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar.

Kriminalitas dan Ketertiban

Di Sumatera Barat, masalah kriminalitas dan ketertiban publik menjadi tantangan yang signifikan. Peningkatan premanisme, parkir liar, dan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Masalah ini berpotensi berdampak pada keadilan ekologis, karena aktivitas kriminal tertentu dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat yang bergantung pada ekosistem lokal.

Permasalahan

- Peningkatan Premanisme: Di beberapa daerah, premanisme semakin merajalela. Premanisme tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan.
- Parkir Liar: Masalah parkir liar di kawasan seperti Taplau Padang menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini juga menunjukkan kurangnya penegakan aturan dan pengaturan tata kota yang efektif.
- Ketidakpatuhan Terhadap Aturan: Banyak warga yang masih kurang patuh terhadap peraturan lalu lintas dan aturan lokal lainnya. Ketidakpatuhan ini sering kali berujung pada ketidakraturan di masyarakat.
- Kriminalitas Akibat Pengangguran dan Kurangnya Pendidikan: Tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya pendidikan sering kali menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas. Pengangguran dan ketidakmampuan memperoleh keterampilan kerja dapat mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal.
- Dampak terhadap Lingkungan: Aktivitas kriminal seperti penambangan liar dan perusakan hutan untuk perambahan bisa berdampak negatif pada lingkungan. Aktivitas ini merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup yang penting bagi masyarakat lokal.

Desakan Kepada Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

ROMPI Sumatera Barat mengajukan desakan berikut kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah kriminalitas dan ketertiban:

- Peningkatan Patroli dan Keamanan: Pemerintah perlu meningkatkan patroli di area rawan kejahatan dan memperkuat sistem keamanan publik untuk mencegah dan menangani kasus kriminal dengan lebih efektif.
- Edukasi Publik tentang Ketertiban dan Kepatuhan: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban, kepatuhan terhadap hukum, dan dampak negatif dari perilaku kriminal terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Program Pelatihan Kerja dan Pendidikan: Mengembangkan dan memperluas program pelatihan kerja dan pendidikan bagi pengangguran dan kelompok usia produktif untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal dan meningkatkan keterampilan mereka.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Memperkuat penegakan hukum dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan, termasuk tindakan terhadap parkir liar dan premanisme.
- Pengawasan dan Pengaturan Tata Kota: Memperbaiki sistem pengaturan dan pengawasan tata kota untuk mengatasi masalah parkir liar dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan publik.

Visi Orang Muda Sumatera Barat

Orang muda di Sumatera Barat memiliki visi untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan adil dengan fokus pada:

- Masyarakat yang Tertib dan Aman: Menciptakan masyarakat yang mematuhi hukum dan aturan, serta memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya ketertiban umum dan keamanan.
- Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan: Mengembangkan program-program yang memberikan peluang pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda untuk mengurangi pengangguran dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas kriminal.
- Keterlibatan Aktif dalam Penegakan Hukum: Mendorong keterlibatan orang muda dalam program-program pencegahan kejahatan dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum dan ketertiban.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan: Memastikan bahwa semua program dan kebijakan penegakan hukum juga mempertimbangkan dampak ekologis untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas kriminal.

Resolusi Orang Muda Pulihkan Indonesia (ROMPI) Sumatera Barat

ROMPI Sumatera Barat merumuskan resolusi berikut untuk mengatasi masalah kriminalitas dan ketertiban:

- Peningkatan Patroli dan Keamanan: Mengimplementasikan sistem patroli yang lebih intensif di area rawan kejahatan dan meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman.
- Kampanye Edukasi Publik: Meluncurkan kampanye yang fokus pada pendidikan publik mengenai kepatuhan hukum, dampak negatif kriminalitas, dan cara-cara menjaga ketertiban umum. Kampanye ini dapat menggunakan berbagai media dan melibatkan komunitas lokal.
- Program Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan kerja dan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi pengangguran, dengan fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
- Penegakan Hukum yang Tegak: Memperkuat penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan, termasuk tindakan terhadap parkir liar dan premanisme. Menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas mereka.
- Pengaturan Tata Kota dan Infrastruktur: Meningkatkan sistem pengaturan dan pengawasan tata kota untuk mengatasi masalah parkir liar dan meningkatkan infrastruktur publik yang mendukung ketertiban umum.



- Pendekatan Terpadu untuk Masalah Ekologis: Mengintegrasikan pertimbangan ekologis dalam semua kebijakan dan program yang terkait dengan kriminalitas dan ketertiban, untuk melindungi lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

Dengan resolusi ini, ROMPI Sumatera Barat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan adil dengan memperhatikan dampak sosial dan ekologis. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, dan memastikan keberlanjutan lingkungan di Sumatera Barat.